

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pengembangan Paket Wisata Budaya di Kampung Wisata Purbayan, Kota Yogyakarta

Isfina Rusvitasari^{1*}, Rr. Adi Hendraningrum², Amanda Rizka Rachim³

Iqlima Ramadhani⁴, Reza Nurizki⁵

Email: irusvitasari@poltekpar-nhi.ac.id

Abstract

Kampung Wisata Purbayan Tourism Village is located in Kotagede, Yogyakarta and has branding as a Heritage Village and Keeper of Traditions. The implementation of the Kampung Wisata Purbayan has a good impact on the community's economy through the cultural tourism packages offered so that good financial management is needed good financial management by the Kampung Wisata Purbayan can generate trust which can have an impact on the sustainability of the Purbayan Tourism Village. This research aims to describe how accountability for financial management in the development of Kampung Wisata Purbayan cultural tourism packages is viewed from the aspects of transparency, liability, controllability, responsibility and responsiveness referring to accountability theory proposed by Koppell (2005).

Keywords: *Accountability, Finance Management, Tour Package, Cultural Tourism.*

Abstrak

Kampung Wisata Purbayan terletak di Kotagede Kota Yogyakarta memiliki branding sebagai Kampung Pusaka dan Penjaga Tradisi. Penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan memiliki dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat melalui paket-paket wisata budaya yang ditawarkan sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik oleh Kampung Wisata Purbayan dapat menghasilkan kepercayaan yang dapat berpengaruh bagi sustainable Kampung Wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya Kampung Wisata Purbayan ditinjau dari aspek transparansi (transparency), pertanggungjawaban (liability), pengendalian (controllability), tanggung jawab (responsibility), dan responsivitas (responsiveness) merujuk pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppell (2005).

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Paket Wisata, Wisata Budaya.

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik swasta, sektor publik, kemasyarakatan, pemerintah, serta organisasi nirlaba. Kampung Wisata Purbayan dalam hal ini merupakan lembaga di bawah Kelurahan Purbayan yang menjalankan organisasi berdasarkan SK Lurah Purbayan Nomor 04/KPTS/PBY/2021 tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024. Kampung Wisata Purbayan terletak di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta memiliki *branding* Kampung Pusaka dan Penjaga Tradisi. Warisan sejarah itulah yang membuat Kampung Wisata Purbayan memiliki keunggulan dan potensi dalam wisata budaya. Sebagai Kampung Pusaka, Purbayan masih menyimpan banyak situs peninggalan Kerajaan Mataram dan juga masih banyak terdapat rumah tradisional khas Kotagede. Selain itu Kampung Wisata Purbayan juga memiliki pengrajin perak yang masih memproduksi dan aktif menjaga tradisi Kotagede yang dikenal sebagai Kota Perak. Selain kerajinan perak, di Kampung Wisata Purbayan juga terdapat kuliner khas yaitu roti kembang waru, legamara, ukel dan banjar. Keberadaan lembaga Kampung Wisata Purbayan (Kamwis) sendiri sudah ada sejak tahun 2013, pada tahun 2021 dilakukan revitalisasi kelembagaan menjadi lembaga sosial di tingkat kelurahan dengan dikeluarkannya SK Lurah Purbayan Nomor

* Isfina Rusvitasari

Received: December 04, 2024; Revised: September 18, 2025; Accepted: November 21, 2025

04/KPTS/PBY/2021 tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024.

Kampung Wisata Purbayan dalam pemeringkatan desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan penilaian Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten per tanggal 5 April 2022 termasuk dalam klasifikasi desa wisata maju, yaitu desa wisata yang memiliki peran aktif terhadap perkembangan ekonomi warga desa dan sekitarnya, artinya dalam pengelolaan keuangannya Kampung Wisata memiliki dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat melalui paket-paket wisata budaya yang ditawarkan dari UMKM di wilayahnya. Telah terdapat banyak paket wisata budaya yang ditawarkan oleh Kampung Wisata Purbayan kepada wisatawan termasuk produk dan potensi ekonomi kreatif dari UMKM di wilayahnya yaitu Mataram Trail, Photo Walk Kotagede, Fun Game Belajar Sejarah, Kampung Penjaga Tradisi, Gala Dinner, Bedah Arsitektur Rumah Tradisional Kotagede, Studi Banding Pengelolaan Kampung Wisata, dan Paket 2 hari 1 malam (sumber: https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/kamwis_purbayan dan <https://kampungwisatapurbayan.com>)

Berikut adalah data laporan pengeluaran dan pemasukan selama tahun 2024 yang didapatkan dari system informasi keuangan Kamwis Purbayan dan pencatatan kas pengelola keuangan Kamwis Purbayan selama tahun 2024:

Tabel 1
Data Laporan Pengeluaran dan Pemasukan Kamwis Purbayan 2024

No	Bulan	Data pemasukan (Rp)	Data Pengeluaran (Rp)
1	Januari	3,200,000	2,964,000
2	Februari	2,000,000	384,500
3	Maret	2,474,500	2,783,000
4	April	2,680,000	5,499,000
5	Mei	6,437,350	1,800,000
6	Juni	6,422,350	2,000,000
7	Juli	6,357,500	4,854,000
8	Agustus	4,375,000	4,350,000
9	September	3,454,900	1,300,000
10	Oktober	4,200,000	700,000
11	November	1,357,500	1,250,000
12	Desember	3,500,000	4,854,000
Total		23,244,900	17,308,000

Sumber: Laporan Keuangan Kamwis Purbayan, 2024

Dari data keuangan di atas Kampung Wisata Purbayan terus mengupayakan pengelolaan keuangannya dengan berusaha meningkatkan pemasukan dari penjualan paket wisata dan terus mengembangkan inovasi paket wisata dari potensi wisata budaya yang dimiliki dengan menjalankan pengelolaan keuangannya agar dapat membawa dampak yang lebih baik lagi bagi masyarakat di Kampung Wisata Purbayan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pengembangan Paket Wisata Budaya di Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta”, dengan mengangkat pertanyaan utama Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta ditinjau dari aspek transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*liability*), pengendalian (*controllability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan responsivitas (*responsiveness*)?” sebagaimana teori Koppel yang menyatakan, “*The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness*”.

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk mengembangkan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian “Akuntabilitas dalam Pengelolaan Desa Wisata Lingga Kecamatan Simpang Empat di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo” pada tahun 2021 yang mengevaluasi kinerja dalam pengelolaan Desa Wisata Lingga dengan menggunakan teori Koppel. Juga pada tahun 2015 penelitian “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik” juga menggunakan lima dimensi pada teori Koppel dalam membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pengembangan Paket Wisata Budaya Kampung Wisata ini merupakan penelitian *case study* (studi kasus) yang menggunakan bukti empiris pada satu atau lebih organisasi (Gillham, 2000) dan penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu prosedur yang menggunakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis, atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati (Meleong, 2007). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Meleong, 2007). Karena penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data kualitatif deskriptif adalah:

1. Pengumpulan data dan informasi yang didapatkan dari observasi yang dilakukan secara langsung melalui wawancara narasumber dan berdasarkan kajian literatur dari penelitian terdahulu.
2. Identifikasi masalah serta menganalisis secara mendalam terkait praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta.
3. Data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam deskripsi yang lengkap dan terperinci secara hati-hati. Selanjutnya data di lapangan akan disesuaikan dengan indikator-indikator yang telah dituliskan penulis untuk membandingkan kesesuaian dengan teori yang ada.
4. Menarik kesimpulan dengan cara mendefinisikan serta mendeskripsikan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta.
5. Memberikan rekomendasi atas implementasi kepada perusahaan dan pihak luar mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta.
6. Subjek dari penelitian ini adalah pengurus penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan yang juga melakukan pengelolaan keuangan dan pengembangan paket wisata Kampung Wisata Purbayan. Objek penelitiannya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya Kampung Wisata Purbayan Kota Yogyakarta.

Sumber Data yang digunakan:

1. Data Primer
Data primer dilakukan dengan dikumpulkan melalui wawancara dan menerapkan instrumen pengumpulan data yang berbentuk observasi yakni pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Informan yang menjadi kunci pada penelitian ini 4 orang yang terdiri dari Tim Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Kewirausahaan, dan masyarakat Kampung Wisata Purbayan. Informan ini dipilih karena dianggap dapat memberi informasi di dalam menjawab rumusan masalah.
2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu atau yang diterbitkan oleh instansi lain yaitu platform Jadesta dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dan *website* Kampung Wisata Purbayan.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan Tim Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Kewirausahaan, dan masyarakat Kampung Wisata Purbayan.
2. Teknik Observasi
Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu di Kampung Wisata Purbayan.
3. Dokumentasi
Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti. Adapun data yang diperoleh dari bahan dokumen adalah laporan keuangan, laporan kegiatan, dokumen hibah, SK dari Kelurahan, SOP atau alur kerja, struktur dan profil organisasi, *leaflet* paket wisata, tangkapan layar *website* dan *cloud storage* Kampung Wisata Purbayan, MoU dengan UMKM penyedia paket wisata, serta dokumen lain yang relevan dengan berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek penelitian.

Koppell dalam Meutia (2015:4) menyebutkan kelima dimensi akuntabilitas yaitu *transparency*, *liability*, *controllability*, *responsibility*, dan *responsiveness* tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, *transparency* dan *liability* dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya. Berdasarkan kelima dimensi tersebut, Koppell dalam Meutia (2015:4) kemudian menjelaskan bahwa yang terjadi dalam pelaksanaannya, organisasi hanya mungkin dapat fokus pada satu dimensi akuntabilitas pada satu waktu. Hal tersebut karena sebuah organisasi tidak bisa akuntabel terhadap kelima dimensi tersebut sepanjang waktu. Berdasarkan indikator pada masing-masing dimensi dikembangkan pertanyaan kunci determinan Berikut ini adalah tabel yang menyajikan dimensi, indikator, dan pertanyaan kunci determinan tersebut:

Tabel 2
Dimensi, Indikator, dan Pertanyaan Kunci Determinan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pengembangan Paket Wisata Budaya Kampung Wisata Purbayan	<i>Transparency</i>	Organisasi memberikan kebenaran informasi kepada publik atas kinerja organisasi dan pengambilan keputusan.	Bagaimana proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan terkait pengelolaan keuangan Kamwis? Apakah anggota Kamwis, Masyarakat, atau Kelurahan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan dalam kegiatan pengembangan paket wisata budaya? Apakah laporan keuangan yang dibuat oleh Kamwis telah dilaporkan? Apakah laporan tersebut telah memenuhi unsur tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan? Apakah ada ketersediaan aksesibilitas atas laporan keuangan Kamwis?

<i>Liability</i>	Organisasi melaksanakan kewajibannya dan bertanggungjawab atas kinerjanya sebagai bentuk konsekuensi kinerja yang telah dilakukan.	Apakah Kamwis melaksanakan sosialisasi tentang potensi pengembangan paket wisata budaya? Apakah Kamwis melaksanakan program kegiatan dalam rangka menggali potensi pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan paket wisata budaya? Apakah Kamwis melaksanakan administrasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan pengembangan paket wisata budaya? Apa saja kendala dan cara menghadapi kendala dimaksud dalam mengelola keuangan pada pengembangan paket wisata budaya? Apakah terdapat pemisahan wewenang yang direpresentasikan pada struktur organisasi dan SOP penyelenggaraan kegiatan di Kamwis?
<i>Controllability</i>	Organisasi menjalankan kegiatannya dengan melakukan pengendalian sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Bagaimana sistem pemantauan atau pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya oleh Kamwis? Apakah terdapat rapat atau pertemuan rutin antara anggota pengurus Kampung Wisata dengan para <i>stakeholders</i> yang lainnya yaitu Masyarakat (RW), Kelurahan, Kemantren, atau Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terkait pengelolaan keuangan di Kamwis? Bagaimana alur pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan di Kamwis?
<i>Responsibility</i>	Organisasi telah mengikuti aturan aturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap hukum.	Apakah Kepala Kamwis menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Lurah/Camat/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun?

Responsiveness

Organisasi mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan dari publik maupun pihak-pihak yang berkepentingan, serta menanggapi permintaan-permintaan publik secara responsif yakni cepat dan tepat.

Apakah laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kamwis?

Apakah terdapat *revenue sharing* dengan UMKM penyedia paket wisata dan bagaimana alur *revenue sharing* tersebut?

Apakah ada paket wisata budaya baru yang akan dikembangkan dan dipasarkan oleh Kampung Wisata? Apa saja pertimbangan dalam membuka paket wisata budaya yang baru?

Apakah Kamwis menyediakan layanan aspirasi masyarakat? Misalnya layanan pengaduan, penyampaian saran/kritik, atau permohonan informasi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

C. HASIL DAN ANALISIS

Dalam penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan melalui pendudukan kegiatan kepariwisataan yang berbasis wisata budaya yang memiliki nilai strategis dan efek ekonomi yang sangat luas sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Purbayan Nomor 04/KPTS/PBY/2021 tentang penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan, maka diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam mengembangkan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan. Untuk melihat bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam mengembangkan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan maka dapat dilihat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Koppell (2005) mencakup lima dimensi yaitu: *transparency*, *liability*, *controlability*, *responsibility*, dan *responsiveness*.

Transparansi (*Transparency*)

Menurut Mardiasmo (2018), prinsip-prinsip transparansi pengelolaan keuangan adalah *informativeness* (informatif) dan *disclosure* (pengungkapan):

1. *Informativeness* (informatif), pemberian informasi atas laporan keuangan kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus disampaikan secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif adalah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan Kamwis menurut Ketua Kampung Wisata belum dibuat secara periodik bulanan, karena posisi bendahara saat ini sedang tidak aktif sejak Januari 2024. Laporan keuangan dibuat pada saat selesai *event* atau kegiatan *tour* paket wisata budaya berakhir. Isi dari laporan keuangan secara umum yaitu catatan pengeluaran dan pemasukan uang, pemasukan keuangan Kamwis sumbernya berasal dari tiket paket wisata budaya, hasil kegiatan atau festival, hadiah kompetisi, atau hibah/donasi dari para donator. Sementara pengeluaran Kamwis biasanya yaitu biaya operasional dan biaya tidak terduga pada penyelenggaraan paket wisata budaya atau kegiatan festival/*event* di Kampung Wisata Purbayan. Karena belum dibuat secara periodik maka laporan keuangan Kamwis juga belum bersifat komparatif apabila dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Informasi yang didapat dari

laporan keuangan Kamwis adalah berapa keuntungan atau profit yang didapat Kamwis yaitu pemasukan dikurangi dengan pengeluaran pada posisi waktu tertentu, atau bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Kamwis baru berupa catatan kertas kerja yang disiapkan untuk pembuatan laporan keuangan dalam hal ini Laporan Laba Rugi.

Akses dalam melihat informasi laporan keuangan, menurut Bapak Ruli Setiawan, Kamwis telah menyiapkan media untuk data laporan dan informasi keuangan di *website* Kamwis dalam bentuk *cloud based* yang dapat diakses oleh masyarakat dan publik, hanya beberapa orang saja yang diberi wewenang untuk akses unggah dan ubah data yaitu ketua dan bendahara Kampung Wisata Purbayan. Media *cloud based* tersebut belum diisi konten data dan informasi laporan keuangan.

2. *Disclosure* (pengungkapan), artinya aktivitas kinerja keuangan telah diungkapkan secara menyeluruh kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*), baik kondisi keuangan, struktur organisasi, dan bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan keuangan hanya diketahui oleh anggota inti dari Kamwis saja. Namun terdapat terdapat forum komunikasi antara Kamwis dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang dilaksanakan satu bulan sekali. Dalam forum komunikasi ini sesama pelaku kepentingan dapat memberikan pendapat dari sudut pandang masing-masing dalam rangka mengembangkan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan. Sedangkan forum dengan dengan masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Rukun Warga (RW), dan dengan *stakeholders* pemerintah yang lain yaitu kelurahan, dan kecamatan sifatnya hanya insidental. Keterbukaan informasi atas kinerja kegiatan Kamwis sendiri telah secara aktif dibagikan melalui *website*, dan melalui media sosial Instagram. *Website* Kamwis menampilkan informasi mengenai paket wisata budaya, profil Kampung Wisata, berita, informasi, serta menampilkan wadah *market place* untuk penjualan souvenir dan kuliner khas Kampung Wisata Purbayan. Sedangkan di media sosial Instagram, Kamwis aktif mengunggah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kamwis atau yang diikuti oleh Kamwis baik di internal Kamwis maupun di luar Kamwis. Media sosial Instragram Kamwis juga aktif memberikan informasi berkaitan dengan atraksi dan spot wisata yang ada di Kampung Wisata Purbayan.

Dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya pada dimensi *transparency* belum optimal dilaksanakan di Kampung Wisata Purbayan terutama dalam informasi yang diberikan melalui laporan keuangan yang belum tepat waktu, memadai, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengungkapan perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan koordinasi dengan para *stakeholders* lainnya yaitu Kelurahan, Kecamatan (Kemantren), dan pihak masyarakat Kampung Wisata Purbayan.

Tanggung Jawab (Liability)

Kampung Wisata Purbayan memiliki kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan SK Keputusan Lurah Purbayan tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024. Dimana di dalam keputusan SK tersebut ditetapkan bahwa penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan meliputi:

1. Melaksanakan sosialisasi tentang potensi wisata;
2. Melaksanakan program dan menggali potensi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pariwisata di Kelurahan Purbayan;
3. Melaksanakan administrasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan kampung wisata;
4. Lain-lain yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Menurut Kepala Kampung Wisata Bapak Ruli Setiawan, Kampung Wisata telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait sosialisasi potensi wisata yaitu sosialisasi kampanye sadar wisata, pelaksanaan kampanye sadar wisata, serta dilakukan penggalan potensi tiap daerah dalam bentuk pemetaan potensi tiap RW di Kelurahan Purbayan. Terkait menggali potensi pemberdayaan masyarakat Kampung Wisata Purbayan mengadakan pelatihan-

pelatihan atau *workshop* UMKM baik diadakan swadaya maupun bekerjasama dengan pihak lainnya. Selain itu Kampung Wisata Purbayan juga pelaksanaan bazar, dan pameran yang melibatkan UMKM di Kelurahan Purbayan.

Dalam hal melaksanakan administrasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan Kampung Wisata menurut Kepala Kampung Wisata Ruli Setiawan dan Sekretaris Kampung Wisata Bapak Dwi Oktavianoro, kampung wisata selalu memberikan laporan pada saat kegiatan yang diselenggarakan termasuk di dalamnya dilampirkan juga laporan keuangan kegiatan. Laporan kegiatan tersebut diberikan kepada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kelurahan Purbayan, Pengurus Kampung Wisata, Pengurus RW, dan kepada masyarakat dan donatur.

Dalam hal lain-lain yang berkaitan dengan kepariwisataan Kampung Wisata Purbayan membuat paket wisata yang bertema wisata budaya. Paket Wisata yang telah tersedia di Kampung Wisata Purbayan yaitu:

1. Mataram *Trail*, yaitu walking tour napak tilas bekas Keratom Mataram Kotagede,
2. *Photowalk* Kotagede, *Tour* Kampung Penjaga Tradisi, wisatawan akan diajak keliling kampung Basen (salah satu wilayah di Purbayan) yang masih banyak pengrajin peraknya. Wisatawan juga dapat secara langsung datang ke bengkel kerajinan perak dan emas putih yang dulunya merupakan tulang punggung toko-toko perak di jalan-jalan utama di Kotagede. Kunjungan ini juga memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk membeli atau pesan secara langsung kepada pengrajin yang tentunya harganya lebih murah daripada di toko.
3. Studi banding, Kampung Wisata Purbayan menyediakan fasilitas termasuk *guide* lokal, narasumber, dokumentasi, makanan tradisional, tempat parkir, dan toilet. Secara langsung kunjungan ini juga memberikan dampak positif pada Masyarakat Kampung Wisata Purbayan.
4. Paket 2 hari 1 malam, menjelajahi Kotagede secara lebih dalam, mengulas dan mengulik tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam secara lebih mendalam, merasakan pengalaman lebih lengkap dan menyeluruh dengan mendatangi semua di Kampung Wisata Purbayan.

Selain paket wisata budaya yang sudah tersedia Kampung Wisata Purbayan juga terus berinovasi untuk membuat paket wisata budaya baru, yang akan dikembangkan dalam waktu dekat adalah *Cycling Tour* dan *Photoshoot*. Pengembangan paket wisata baru *Cycling Tour* karena adanya hibah sepeda onthel dari Program Penguatan Kapasitas ORMAWA HMPS PBSI (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) berdasarkan Surat Penyerahan Hibah Alat PPK Ormawa HMPS PBSI Nomor 0037/PPKO/UAD/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024. Selain pengembangan paket wisata budaya Kampung Wisata Purbayan juga aktif dalam menyelenggarakan festival budaya dan menerima kunjungan dan kolaborasi dari pihak eksternal, serta penyediaan *venue* untuk penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan lainnya.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan oleh Kamwis, misalnya adalah terbatasnya SDM aktif dan kendala pendanaan. Untuk kendala SDM Kamwis akan mendatangkan SDM dari luar misalnya dalam hal keterbatasan *tour guide* yang menguasai bahasa asing selain bahasa inggris. Serta pemberian insentif atau kompensasi berupa *fee* untuk anggota Kamwis yang aktif dalam penyelenggaraan kegiatan atau sifatnya baru *by project*. Demikian pula untuk kendala kekurangan pendanaan, anggota Kamwis mengeluarkan biaya sendiri atau biaya pribadi untuk menutupi kekurangan pendanaan tersebut. Dapat disimpulkan dari dimensi kewajiban dan tanggung jawab (*liability*) akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya telah berjalan dengan optimal karena Kamwis bertanggungjawab langsung atas tugas dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengembangan paket wisata budaya di Kampung Wisata Purbayan.

Pengendalian (Controllability)

Indikator pengendalian atau pengawasan ini adalah memastikan Kampung Wisata Purbayan telah melakukan pengelolaan keuangan dalam mengembangkan paket wisata budaya sesuai dengan yang diharapkan dengan pengendalian atau pengawasan. Hal ini diuraikan dalam 3 sub indikator:

1. Adanya pemisahan tugas dan wewenang, menurut Kepala Kampung Wisata Bapak Ruli Setiawan dan Seksi Kewirausahaan Ibu Khaleili Nungki telah memiliki struktur organisasi, Setiap fungsi pada struktur organisasi menjalankan tugasnya masing-masing. Walaupun terdapat kendala yaitu hanya sedikit jumlah anggota Kamwis yang aktif. Salah satunya adalah posisi bendahara yang sedang tidak aktif sejak Januari 2024 sehingga posisi bendahara dirangkap dengan Bapak Ruli Setiawan sebagai Ketua Kampung Wisata. Hal ini membuat pelaporan bendahara yang seharusnya melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan maksimal setiap tanggal 10 bulan berikutnya menjadi kurang optimal. Selain itu juga menimbulkan risiko konflik kepentingan dan wewenang antara posisi Ketua Kampung Wisata sekaligus sebagai bendahara.
2. Adanya pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh Kelurahan karena Kamwis merupakan salah satu Lembaga di bawah kelurahan, serta pengendalian dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Menurut Bapak Ruli Setiawan belum pernah ada evaluasi, pengawasan, audit, atau *review* dari Kelurahan maupun *stakeholders* pemerintah lainnya terkait kinerja keuangan dan kegiatan di Kamwis. Kamwis tidak selalu mengagendakan rapat terkait pengelolaan keuangannya secara berkala dengan anggota Kamwis, masyarakat dalam hal ini RW dan Kelurahan dan *stakeholders* pemerintah yang lain.
3. Pengawasan Anggaran dan Kegiatan, selama ini Kamwis belum pernah mendapatkan bantuan dana atau anggaran dari pemerintah, hasil penerimaan dari Kamwis adalah dari penyelenggaraan kegiatan atau even, tiket paket wisata, hadiah lomba, dan donasi dari donatur maupun pihak eksternal. Pengelolaan keuangan atas keluar masuknya uang hanya dilakukan oleh anggota aktif di Kamwis saja terutama Ketua Kamwis yang juga masih merangkap menjadi bendahara. Untuk kontrol atau pengendalian kegiatan paket wisata Kampung Wisata telah memiliki SOP berupa alur kerja proses bisnis pelayanan Kampung Wisata Purbayan. Selain alur kerja proses bisnis pelayanan, terdapat juga *Standard Operating Procedure* (SOP) teknis berupa:
 1. SOP Reservasi Paket Wisata
 2. SOP Pra Tour
 3. SOP After Tour
 4. SOP Menangani Komplain
 5. SOP Melakukan Panggilan Telepon
 6. SOP Menerima Telepon

Dengan adanya struktur organisasi, alur kerja bisnis, dan SOP teknis artinya Kampung Wisata telah memiliki alat pengendalian untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengembangan paket wisata yang ditawarkan. Setiap penyelenggaraan *tour* atau kegiatan dilakukan rapat evaluasi untuk memastikan kegiatan atau *tour* telah sesuai dengan SOP dan akan lebih baik lagi ke depannya. Namun dari itu belum pernah ada pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan kampung wisata yang dilakukan terutama oleh Kelurahan atau Kecamatan, sehingga pengawasan dalam bidang eksternal belum dijalankan secara optimal.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga dari dimensi tanggung jawab pengelolaan keuangan indikator yang dapat dilihat yaitu dari proses:

1. Perencanaan:

Kampung Wisata Purbayan tidak menyusun APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena belum pernah mendapatkan bantuan anggaran atau dana daerah, sehingga untuk proses perencanaan penggunaan dana Kamwis dilakukan dengan melakukan rapat oleh anggota Kamwis yang biasa dilakukan sebelum penyelenggaraan kegiatan dan rapat evaluasi setelah penyelenggaraan kegiatan, serta melalui forum komunikasi dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta setiap satu bulan sekali.
2. Pelaksanaan:

Kamwis telah mencatat penerimaan dan pengeluarannya melalui rekening kas Kamwis yang biasa diperbaharui sesudah penyelenggaraan acara atau kegiatan, belum dilakukan secara periodik bulanan.

3. Penatausahaan:

Kampung Wisata melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan masih dalam bentuk sederhana yaitu data catatan pemasukan dan pengeluaran yang ditatausahakan oleh bendahara yang sedang dirangkap oleh Ketua Kamwis sejak Januari 2024, pencatatannya juga belum dipisahkan berdasarkan jenis buku kas umum, kas pembantu pajak, dan bank.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

Kampung Wisata Purbayan tidak menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun pelaksanaan APBD karena tidak mendapatkan bantuan anggaran, yang dilaporkan adalah laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan paket wisata budaya termasuk di dalamnya laporan keuangan kegiatan yang disampaikan kepada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kelurahan Purbayan, Ketua RW setempat, masyarakat atau donatur kegiatan.

Berdasarkan profil Kampung Wisata disebutkan bahwa ke depannya Kampung Wisata yang saat ini masih merupakan lembaga sosial akan dibentuk menjadi badan usaha koperasi karena paling relevan bagi lembaga pengelola kampung wisata di wilayah Kota. Jenis koperasinya adalah Koperasi Jasa. Sesuai dengan untuk badan usaha kecil menengah dalam hal ini Kampung Wisata Purbayan pelaporan keuangannya seharusnya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Kecil Menengah Makro (SAK-EMKM). Kriteria menggunakan SAK-EMKM adalah kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) namun di luar tanah dan bangunan tempat Kampung Wisata Purbayan berada, serta hasil penjualan jasa tahunan sekitar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000 (Dua Setengah Milyar Rupiah) (IAI, 2020). Adapun laporan keuangan yang disajikan dan dipersiapkan sesuai dengan SAK-EMKM yang dapat disetarakan dengan Kampung Wisata Purbayan adalah:

1. Laporan Keuangan Posisi Keuangan
2. Laporan Keuangan Laba Rugi
3. Catatan Laporan Keuangan

Menurut Ketua Kampung Wisata Bapak Ruli Setiawan Kampung Wisata belum membuat laporan sesuai dengan SAK-EMKM di atas karena belum adanya sumber daya manusia yang menguasai pelaporan keuangan dimaksud. Laporan keuangan dibuat di setiap akhir kegiatan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran pada setiap kegiatan, diketahui oleh Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Seksi Kewirausahaan. Laporan yang sudah dibuat oleh Kampung Wisata saat ini yaitu:

1. Laporan keuangan secara umum yang berisi:
 - a. Pemasukan hasil pendapatan dari penyelenggaraan kegiatan dan tiket paket wisata, dan,
 - b. Pengeluaran keuangan penyelenggaraan kegiatan dan pengeluaran paket wisata.
2. Laporan penyelenggaraan kegiatan atau even yang dilaksanakan Kamwis.

Maka dalam hal ini Kampung Wisata Purbayan belum sepenuhnya menerapkan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM. Namun, Kampung Wisata telah menuju ke arah pelaporan tersebut dengan tersedianya buku atau laporan catatan pengeluaran dan laporan catatan pemasukan yang dapat menjadi kertas kerja yang disiapkan untuk pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM di atas.

Responsivitas (Responsiveness)

Menurut wawancara dengan Seksi Kewirausahaan Kampung Wisata Ibu Khaleili Nungki pembagian *revenue sharing* antara Kamwis dengan UMKM diatur melalui MoU, bagi UMKM yang menitipkan barang lewat kegiatan yang diselenggarakan oleh Kamwis ditetapkan *revenue sharing* sebesar 5%-10% dari harga produk UMKM. Sedangkan Kampung Wisata memberikan donasi atau imbalan bagi UMKM yang dikunjungi pada saat kunjungan paket wisata budaya. Kunjungan ke UMKM tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk UMKM itu sendiri dan insentif kunjungan dan pembelian kembali produk UMKM oleh wisatawan.

Adapun UMKM yang telah bekerjasama dengan Kampung Wisata adalah UMKM penghasil makanan atau kuliner seperti kue kembang waru, pengrajin perak, dan pengrajin batik.

Menurut wawancara dengan Ketua Kampung Wisata Bapak Ruli Setiawan terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan dalam pengembangan paket wisata budaya yaitu karena kurangnya SDM yang aktif dalam Kampung Wisata, dalam sisi paket wisata SDM untuk *tour guide* juga kurang berdasarkan wawancara dengan Seksi Publikasi Kampung Wisata Bapak Yono Mulyono bahwa jumlah *tour guide* hanya 5 orang dan belum belum mencukupi permintaan yang wisatawan yang datang, terutama apabila spesifik kebutuhannya adalah *tour guide* berbahasa asing, sehingga menurut wawancara dengan Ketua Kamwis Bapak Ruli Setiawan, Kampung Wisata butuh menarik tenaga *tour guide* dari luar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Seksi Kewirausahaan Ibu Khaleili Nungki juga menyebutkan masih ada beberapa UMKM yang belum bekerjasama dengan Kamwis sehingga masih diperlukan upaya agar dibuat *Memo of Understanding* (MoU) dengan UMKM tersebut sehingga dapat saling mengembangkan bisnis bagi UMKM maupun Kampung Wisata. Beberapa UMKM yang belum berkerjasama misalnya pada usaha kuliner Kafe Longkang yang terletak di area dalam *Between Two Gates*, serta beberapa UMKM yang menyediakan saja sewa kostum mataram dan jasa fotografi di area masjid mataram.

Terdapat pertimbangan bagi Kampung Wisata dalam mengembangkan paket wisata budaya yaitu modal dan *margin* dari *revenue sharing* yang masih kecil, serta sumber pemasukan yang masih belum optimal sehingga masih menggunakan kas pribadi dari Ketua Kampung Wisata. Dalam pembukaan paket wisata baru Kamwis juga mempertimbangkan adanya tren dan permintaan pasar misalnya paket untuk *photoshoot*, karena tren media sosial dan *digital marketing* yang meningkat membuat pangsa pasar untuk paket ini dinilai akan meningkat. Selain tren pasar dampak terhadap lingkungan sekitar dan keterlibatan masyarakat dalam berperan juga menjadi pertimbangan paket wisata baru, dengan adanya paket wisata *photoshoot* bisa juga melibatkan masyarakat yang memiliki usaha fotografi dan sewa kostum di area Kampung Wisata Purbayan. Paket wisata budaya baru yang juga akan dibuka yaitu *cycling tour* karena adanya hibah sepeda onthel dari eksternal yang dapat digunakan sebagai *working capital* atau modal untuk paket wisata ini dan juga melihat era dan tren pasar.

Kampung Wisata Purbayan belum memiliki sarana untuk menampung pengaduan, maupun saran dan kritik dari asyarakat lagi, sebelumnya Kampung Wisata pernah memiliki sarana pengaduan tetapi menuru Bapak Ruli Setiawan masyarakat masih ragu untuk mengaspirasikan saran dan kritiknya karena takut akan diajak bergabung sebagai anggota Kamwis, sementara keanggotaan Kamwis masih bersifat sukarela, tidak ada sistem penggajian. Namun Kampung Wisata membuka saran dan kritik melalui sosial media yang ada di instagram bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kampung Wisata Purbayan.

D. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan Kampung Wisata Purbayan yang dilakukan oleh lembaga Kampung Wisata Purbayan, 3 dari 5 dimensi akuntabilitas diantaranya belum dapat dinilai optimal yaitu dimensi *transparency*, dan *controllability*, sedangkan untuk dimensi *liability*, *responsibility*, dan *responsiveness* akuntabilitasnya telah menunjukkan tingkat yang optimal. Hal ini telah sesuai dengan teori Koppell dalam Meutia (2015:4) bahwa kelima dimensi akuntabilitas yaitu tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, *transparency* dan *liability* dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya. Kemudian telah sesuai juga dengan teori dimaksud bahwa yang terjadi dalam pelaksanaannya, organisasi hanya mungkin dapat fokus pada satu dimensi akuntabilitas pada satu waktu. Hal tersebut karena sebuah organisasi tidak bisa akuntabel terhadap kelima dimensi tersebut sepanjang waktu.

Tabel 3
Dimensi Akuntabilitas, Indikator, dan Ketercapaian

Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Ketercapaian
<i>Transparency</i>	Organisasi memberikan kebenaran informasi kepada publik atas kinerja organisasi dan pengambilan keputusan.	Tercapai
<i>Liability</i>	Organisasi melaksanakan kewajibannya dan bertanggungjawab atas kinerjanya sebagai bentuk konsekuensi kinerja yang telah dilakukan.	Tercapai
<i>Controllability</i>	Organisasi menjalankan kegiatannya dengan melakukan pengendalian sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Belum Tercapai
<i>Responsibility</i>	Organisasi telah mengikuti aturan aturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap hukum.	Belum Tercapai
<i>Responsiveness</i>	Organisasi mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan dari publik maupun pihak-pihak yang berkepentingan, serta menanggapi permintaan-permintaan publik secara responsif yakni cepat dan tepat.	Tercapai

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Selanjutnya beberapa saran yang dapat diberikan kepada Kampung Wisata Purbayan:

1. Dari dimensi *transparency*, media *cloud based* pada *website* Kamwis yang telah disiapkan sebaiknya dapat segera dimanfaatkan. Laporan keuangan yang nanti akan ditampilkan sebaiknya juga telah dibuat secara berkala dan lengkap, sehingga informasi keuangan yang diunggah nanti lebih memadai, *full disclosure*, komparatif, dan dapat menjadi ukuran kinerja keuangan yang sebenarnya dari Kamwis. Dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan Kamwis juga dapat melibatkan masyarakat dan Kelurahan sehingga dapat merencanakan bersama kebutuhan dan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan Kamwis dalam mengembangkan paket wisata budaya. Perencana keuangan harus direncanakan dengan baik menyesuaikan dengan modal yang dimiliki, pengeluaran juga harus diverifikasi sesuai dengan manfaatnya dengan melakukan analisis untung rugi berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun.
2. Dari dimensi *liability*, untuk mendorong Kamwis berkembang dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik sebaiknya tidak mencampur dengan uang usaha dan uang pribadi. Kamwis belum pernah mendapatkan dana pembantuan berupa dana anggaran, maka Kampung Wisata dapat berkoordinasi dengan *stakeholders* pemerintahan untuk mendapatkan dana pembantuan atau bantuan dana dari pemerintah setempat. Pembantuan ini sebagai bentuk kepercayaan penuh kepada Kampung Wisata untuk dapat untuk membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan mendapatkan dana pembantuan ini Kampung Wisata dapat lebih mengembangkan paket wisata budaya yang ditawarkan dan secara luas dapat meningkatkan efek ekonomi yang sangat luas sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan.
3. Dari dimensi *controllability*, Kamwis dapat melakukan pemisahan fungsi dan wewenang sesuai struktur organisasinya karena masih ada perangkapan jabatan Ketua Kamwis dan Bendahara. Kelurahan sebagai Lembaga yang menaungi Kampung Wisata Purbayan sebaiknya juga melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik atas penyelenggaraan Kampung Wisata Purbayan. Evaluasi atau pengawasan berkala dibutuhkan dalam menganalisis apakah kegiatan operasional usaha Kampung Wisata

sudah tepat atau perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi usaha Kamwis dalam mengembangkan paket wisata budaya.

4. Dari dimensi *responsibility*, Kamwis sebaiknya melengkapi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar SAK untuk EMKM berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga kinerja keuangan Kampung Wisata Purbayan dapat terukur dengan baik. Hal ini juga untuk mendukung Kamwis berkembang sebagai unit usaha koperasi ke depannya. Selain menggunakan buku, pelaporan keuangan dapat menggunakan *software* keuangan sederhana yang akan lebih memudahkan proses pencatatan.
5. Dari dimensi *responsiveness*, dalam menjalankan unit usaha nantinya Kamwis diharapkan tidak hanya dapat mengelola keuntungan dari *revenue sharing* dari MoU dengan UMKM tetapi juga dengan RW yang ada di Kelurahan Purbayan, sehingga tingkat partisipatif masyarakat meningkat dalam mengembangkan paket wisata budaya. Meningkatkan arus kas untuk keberlangsungan usaha Kamwis juga tidak hanya dari hasil tiket paket wisata budaya saja tetapi juga dengan mengelola lahan untuk parkir atau *venue event* serta menyewakan aset berjalan Kampung Wisata Purbayan Kamwis sebagai sumber pendanaan. Sebaiknya juga Kamwis dapat membuat sarana pengaduan atau sarana untuk masyarakat maupun pengunjung memberikan saran dan kritik atas penyelenggaraan dan pelayanan kegiatan oleh Kampung Wisata Purbayan.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dan dapat menjadi bahan untuk dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya yaitu belum terdapatnya data laporan keuangan yang menyeluruh dan data kunjungan wisatawan yang datang ke Kampung Wisata Purbayan selama periode penelitian. Kedua data tersebut dapat menjadi indikator hasil kinerja lebih dapat terukur dengan baik dari Kamwis Purbayan apabila penelitian selanjutnya ingin mengangkat penelitian tentang kinerja keuangan Kamwis Purbayan.

DAFTAR REFERENSI

Journal Article:

- Ahmad, A. W., & Septriani, Y. (2008). Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 47–56.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 03(2), 287–299. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Koppel, J. G. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder”. *Public Administration Review*, 65, 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434>
- Meutia, E. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang. 01(01).
- Ningrum, E. D., & As'ari, H. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Memfungsikan Pasar Model. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 212.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19(1).

Books:

- Darmajati, R. S. (2001). *Istilah – Istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munasef. (1995). *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Pendit, Nyoman S. (2006). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purba, D. S. (2021) *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Putra, Darma dan I Gde Pitana. (2010). *Pariwisata Pro Rakyat*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Yoeti, O. E. (1990). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Websites:

https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/kamwis_purbayan

<https://kampungwisatapurbayan.com>